

**LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURABAYA WONOCOLO
TAHUN 2024**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014, Nota Dinas Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-1263/SJ.1/2024, dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, bahwa Pimpinan Unit Pemilik Kinerja (UPK) *Three* di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu menyusun LAKIN Tahun 2024.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Wonocolo adalah salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung di bawah Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur I. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Wonocolo didirikan dan mulai beroperasi pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.01/1994 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP Surabaya Wonocolo berada dibawah Kantor Wilayah IX di Surabaya dengan wilayah administrasi pemerintahan meliputi Kecamatan Wonokromo, Wonocolo, Jambangan, Karangpilang, Gayungan, Wiyung, Tenggilis Mejoyo, Gunung Anyar, dan Rungkut.

Pada tahun 2001, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, kantor ini dipecah menjadi dua kantor pajak, yakni KPP Surabaya Wonocolo dan KPP Surabaya Rungkut. Pada tahun 2007, sejalan dengan berjalannya proses modernisasi di tubuh Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tanggal 5 November 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Operasi KPP Pratama dan KP2KP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kanwil DJP Bali, KPP Surabaya Wonocolo berubah nama menjadi KPP Pratama Surabaya Wonocolo dengan terhitung saat mulai operasi adalah mulai tanggal 13 November 2007. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, menetapkan wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo meliputi 4 kecamatan yakni Kecamatan Jambangan, Kecamatan Gayungan, Kecamatan Wonocolo, dan Kecamatan Wonokromo dengan total luas wilayah 24.78 km².

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 KPP Pratama Surabaya Wonocolo memperoleh target sebesar **Rp2.362.209.115.000** dengan realisasi **Rp2.364.503.053.374**. Realisasi tersebut tumbuh positif sebesar 12,18% terhadap realisasi tahun 2023 (**Rp 2.107.849.942.150**). Dengan target tersebut menjadikan KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebagai KPP tingkat Pratama dengan target terbesar di Kanwil DJP Jawa Timur I. Secara keseluruhan, sektor Administrasi Pemerintahan dan Jasa Sosial Wajib menjadi penyumbang terbesar penerimaan kantor sebesar 41,34% terhadap realisasi.

Berdasarkan olahan data yang diambil dari Badan Pusat Statistik Kota Surabaya Tahun 2023, jumlah penduduk pada wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebesar 333.180 jiwa. Dengan jumlah angkatan kerja sebesar 261.214 jiwa dan kepadatan penduduk terhadap total wilayah 13.446 jiwa/km². menjadi tantangan tersendiri dalam menggali potensi pajak dari aktivitas ekonomi Wajib Pajak (WP) saat ini. Dengan kondisi geografis dan demografis tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Surabaya Wonocolo mengingat penerimaan kantor ditopang oleh Administrasi Pemerintahan dan Jasa Sosial Wajib sebesar 41,34% sedangkan Sektor Perdagangan hanya menyumbang sebesar 12,69%.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan PMK Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo ditetapkan meliputi 4 kecamatan dan memiliki 19 kelurahan, yaitu:

1. **Kecamatan Wonokromo**, terdiri dari 6 kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Sawunggaling
 - Kelurahan Wonokromo
 - Kelurahan Jagir
 - Kelurahan Ngagelrejo
 - Kelurahan Ngagel
 - Kelurahan Darmo
2. **Kecamatan Wonocolo**, terdiri dari 5 kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Siwalankerto
 - Kelurahan Jemur Wonosari
 - Kelurahan Margorejo
 - Kelurahan Bendul Merisi

- Kelurahan Sidosermo
- 3. **Kecamatan Jambangan**, terdiri dari 4 kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Pagesangan
 - Kelurahan Kebonsari
 - Kelurahan Jambangan
 - Kelurahan Karah
- 4. **Kecamatan Gayungan**, terdiri dari 4 kelurahan yaitu:
 - Kelurahan Dukuh Menanggal
 - Kelurahan Menanggal
 - Kelurahan Gayungan
 - Kelurahan Ketintang

C. Visi dan Misi KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Visi : Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang memberikan pelayanan terbaik berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Misi : Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh informasi dan layanan perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

D. Peran Strategis Instansi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo merupakan instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pajak yang bernaung pada Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo berperan sebagai salah satu ujung tombak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak secara nasional sesuai dengan amanat pasal 23 UUD 1945.

E. Tugas . Fungsi Dan Struktur Organisasi

KPP Pratama Surabaya Wonocolo merupakan Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Diharapkan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya serta mendukung KPP Pratama Surabaya Wonocolo dalam mencapai sasaran berupa rencana penerimaan yang telah ditetapkan.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berjenis Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. KPP Pratama Surabaya Wonocolo memiliki tugas melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan

penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam proses bisnisnya. Tugas dan Fungsi diturunkan langsung kepada kepala Subbagian Umum dan Kepala Seksi yang merupakan jabatan pengawas atau eselon IV dan Kelompok Pejabat Fungsional.

- 1) Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal (SUKI) memiliki tugas melakukan urusan kepegawaian. keuangan. tata usaha. rumah tangga. pengelolaan kinerja. melakukan pemantauan pengendalian intern. pengujian kepatuhan dan manajemen risiko. internalisasi kepatuhan. penyusunan laporan. pengelolaan dokumen non perpajakan. serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- 2) Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis. penjabaran. dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencarian. pengumpulan. pengolahan. penyajian data dan informasi perpajakan. perekaman dokumen perpajakan. pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan. penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi. penerusan data hasil penjaminan kualitas. tindak lanjut atas distribusi data. penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data. dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data. serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- 3) Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis. penjabaran. dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan. pengelolaan registrasi perpajakan. penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan. penerimaan. tindak lanjut. dan proses penyelesaian permohonan. saran dan/ atau pengaduan. dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat. pemenuhan hak Wajib Pajak. serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan. dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- 4) Seksi Pemeriksaan. Penilaian. dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis. penjabaran. dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan. pelaksanaan penilaian properti. bisnis. dan asset tak berwujud. pelaksanaan tindakan penagihan. penundaan dan angsuran tunggakan pajak. serta melakukan

penatausahaan piutang pajak. dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan. penilaian. dan penagihan.

- 5) Seksi Pengawasan I. Seksi Pengawasan II. Seksi Pengawasan III. Seksi Pengawasan IV. Seksi Pengawasan V. dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis. penjabaran. dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan. pelaksanaan. dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak. penguasaan wilayah. pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi. pencarian. pengumpulan. pengolahan. penelitian. analisis. pemutakhiran. dan tindak lanjut data perpajakan. pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 3 kelompok yakni Kelompok jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak (*auditor*) memiliki Tugas Pemeriksa Pajak meliputi Pemeriksaan. Pemeriksaan Bukti Permulaan. dan/atau Penyidikan. jabatan Fungsional Penilai (*appraisal*) memiliki tugas melaksanakan kegiatan di bidang penilaian properti dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jabatan Fungsional Penyuluh memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang perpajakan.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis. penjabaran. dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan. edukasi. pendaftaran. dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak. objek pajak. dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan. pemeriksaan. penilaian. dan penagihan pajak;
- i. pendataan. pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak. dan pengenaan;

- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Secara struktur organisasi, KPP Pratama Surabaya Wonocolo dipimpin oleh seorang kepala kantor, dan terdiri atas 1 (satu) subbagian, 9 (sembilan) seksi, dan 2 (dua) kelompok fungsional pemeriksa pajak. Jumlah keseluruhan pegawai adalah 109 orang.

Gambar 0.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Wonocolo



Sumber: Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

F. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai KPP Pratama Surabaya Wonocolo sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 109 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 0.1 Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Seksi

No	Seksi	Pegawai	% Komposisi Pegawai terhadap Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1	1%
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	10	9%
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	5	5%
4	Seksi Pelayanan	11	10%
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	9	8%
6	Seksi Pengawasan I	9	8%
7	Seksi Pengawasan II	8	7%
8	Seksi Pengawasan III	8	7%
9	Seksi Pengawasan IV	9	8%
10	Seksi Pengawasan V	7	6%
11	Seksi Pengawasan VI	9	8%
12	Fungsional Penyuluh	6	6%
13	Fungsional Pemeriksa Pajak	17	16%
Jumlah Pegawai		109	100%

Sumber: Diolah Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 0.1 menunjukkan bahwa komposisi pegawai terbanyak pada Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak sebanyak 17 orang pegawai atau 16% dari jumlah pegawai. Urutan kedua Seksi Pelayanan sebanyak 11 orang pegawai atau 10% dari jumlah pegawai. Sedangkan sisanya di bawah 10% antara satu sampai sepuluh orang pegawai ditempatkan pada masing-masing seksi atau subbagian lainnya.

Tabel 0.2 Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pegawai	% Komposisi Pegawai terhadap Jumlah Pegawai
1	Laki-Laki	60	55%
2	Wanita	49	45%
Jumlah Pegawai		109	100%

Sumber: Diolah Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 0.2 menunjukkan bahwa komposisi pegawai di KPP Pratama Surabaya Wonocolo memiliki sebaran pegawai berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada wanita yakni laki-laki sebesar 55% dan wanita sebesar 45%.

Tabel 0.3 Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Pegawai	% Komposisi Pegawai terhadap Jumlah Pegawai
1	20-29	34	31%
2	30-39	32	29%
3	40-49	25	23%
4	> 50	18	17%
Jumlah Pegawai		109	100%

Sumber: Diolah Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 0.3 menunjukkan bahwa komposisi jumlah pegawai berdasarkan usia didominasi pegawai dengan rentang usia 20 tahun sampai dengan 29 tahun sebanyak 34 pegawai atau 31% dari total pegawai dan usia 30 tahun sampai dengan 39 tahun sebanyak 32 pegawai atau 29% dari total pegawai. Urutan selanjutnya pegawai dengan rentang usia 40 tahun sampai dengan 49 tahun dengan jumlah sebanyak 25 pegawai atau 23% dari total pegawai. Urutan terakhir pegawai sebanyak 18 orang pegawai atau 17% pegawai dari total pegawai berusia diatas 50 tahun.

Tabel 0.4 Komposisi Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Pegawai	% Komposisi Pegawai terhadap Jumlah Pegawai
1	SMA	1	1%
2	D-I	15	14%
3	D-III	24	22%
4	D-IV/S1	42	38%
5	S2	27	25%
Jumlah Pegawai		109	100%

Sumber: Diolah Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 0.4 menunjukkan bahwa jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pegawai KPP Pratama Surabaya Wonocolo didominasi oleh jenjang pendidikan D-IV/S1 sebanyak 42 pegawai atau 38% dari total pegawai. Jenjang pendidikan terbanyak kedua adalah S-2 sebanyak 27 pegawai atau 25% dari total pegawai. Urutan ketiga tertinggi adalah jenjang pendidikan D-III sebanyak 24 pegawai atau 22% dari total pegawai. Urutan keempat adalah jenjang pendidikan D-I sebanyak 15 pegawai atau 14% dari total pegawai. Sisanya dibawah 10% menempuh pendidikan tingkat SMA sebanyak 1 pegawai (1%).

G. Komposisi Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah bagian dari perspektif pelanggan (*customer*) yang memiliki peranan penting dalam pencapaian visi atau tujuan Direktorat Jenderal Pajak (Syaifudin & Bachtiar, 2013) yakni menjadi institusi penghimpun penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Wajib Pajak mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memungut atau memotong, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan dan kepuasan atas terpenuhinya hak Wajib Pajak sangat berpengaruh pada tingkat optimalisasi penerimaan pajak.

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri sesuai dengan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo sampai tanggal 31 Desember 2024 sebanyak 171.880.

Tabel 0.5 Daftar Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Jenis WP/ Status WP	Aktivasi Sementara	Non Efektif	Normal	PL/DE	Jumlah
BADAN	0	7707	8621	3815	21976
OP	0	101090	37896	9486	148564
PEMUNGUT	0	3	151	879	1340
Jumlah	0	108800	46668	14180	169648

Cut-off: 08 Januari 2025

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 0.5 menunjukkan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo per tanggal 31 Desember 2024. Dari tabel dapat diuraikan jika Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo tidak semua Wajib Pajak Wajib melaporkan SPT. Hal ini disebabkan Wajib Pajak sedang dalam proses melakukan Non Efektif (NE) atau status Hapus (DE).

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kegiatan usaha Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo diberbagai sektor tersebut diklasifikasikan dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha pajak yang digolongkan berdasarkan beberapa kategori.

Tabel 0.6 9 Besar Daftar Wajib Pajak berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

KLU	Keterangan	Jumlah	%
Z5000	PEGAWAI SWASTA	88061	51.23%
Z2100	PEGAWAI NEGERI SIPIL	15940	9.27%
47112	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN. MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPERMARKET (TRADISIONAL)	13764	8.01%
Z4000	PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA/BADAN USAHA MILIK DAERAH	3599	2.09%
96990	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL	3558	2.07%
Z3000	PRAJURIT TNI DAN ANGGOTA POLRI	3373	1.96%
46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	2018	1.17%

Z6000	PENSIUNAN PNS/PRAJURIT TNI/ANGGOTA POLRI	1382	0.80%
46100	PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	1182	0.69%

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Tabel 0.6 menunjukkan bahwa 9 besar Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Wonocolo berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Wajib Pajak dengan Kode KLU Z5000 mendominasi dengan uraian KLU Pegawai Swasta sebanyak 88.061 Wajib Pajak atau 51.23% dari total Wajib Pajak yang terdaftar. Kedua. Wajib Pajak dengan Kode KLU Z2100 dengan uraian KLU Pegawai Negeri Sipil. Ketiga. Wajib Pajak dengan Kode KLU 47112 dengan uraian KLU Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan. Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional). Sedangkan sisanya dibawah 5% diklasifikasikan pada masing-masing Kode KLU pajak lainnya.

H. Mandat yang diberikan

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). menunjukkan bahwa lebih dari 80% pendapatan negara bersumber dari sektor pajak. Dalam memenuhi dan menghimpun penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan target rencana penerimaan setiap tahunnya yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo juga memiliki peran strategis untuk turut menghimpun penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan target tahun 2024 sebesar Rp 2.362.209.115.000. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan. telah dilakukan berbagai langkah dan upaya yang optimal. termasuk dari kegiatan penyuluhan. pelayanan. pengawasan. pemeriksaan. dan penagihan pajak.

Tabel 0.7 Data Penerimaan KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Tahun	2022	2023	2024
Target (Rp)	1.566.316.908.000	1.983.037.875.000	2.362.209.115.000
Bruto (Rp)	2.135.723.305.117	2.205.824.936.140	2.483.366.574.163
SPMKP (Rp)	58.297.812.623	97.979.156.152	118.863.520.789
Netto (Rp)	2.077.425.492.494	2.107.845.779.988	2.364.503.053.374

Sumber: Seksi Penjaminan Kualitas Data

Capaian (%)	132.63%	106.29%	100.10%
-------------	----------------	----------------	----------------

Tabel 0.7 menunjukkan target yang dibebankan dan realisasi penerimaan yang dihimpun oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo pada tahun 2022 hingga tahun 2024. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa tahun 2023 target yang dibebankan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo mengalami kenaikan. Lalu pada tahun 2024 target yang dibebankan kepada KPP Pratama Surabaya Wonocolo juga mengalami kenaikan. Realisasi penerimaan yang dihimpun mengalami Penurunan dari tahun 2022 hingga tahun 2023. dan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami penurunan.

I. Sarana/prasarana

a. Gedung :

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo menempati gedung di Jalan Jagir Wonokromo No. 104 lantai 1. 2 dan 3 Kota Surabaya

b. Inventaris Kendaraan :

1. Kendaraan Roda Empat : 7 Unit
2. Kendaraan Roda Dua : 11 Unit

c. Jaringan sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dengan menggunakan sistem LAN

d. Perangkat Komputer terdiri dari :

1. Server : 7 buah
2. Modem : 2 buah
3. CPU : 156 buah
4. Monitor : 156 buah
5. Printer : 52 buah
6. UPS : 3 buah
7. Notebook : 90 buah

J. Aspek-aspek Eksternal

- a. Hubungan dengan pihak ketiga / Pemda / Instansi terkait cukup baik;
- b. Potensi di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo cukup baik;
- c. Kondisi lingkungan yang cukup menunjang; dan
- d. Perubahan / perkembangan sosial dan ekonomi yang sangat cepat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Pengukuran kinerja instansi merupakan proses secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program instansi, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Strategi Organisasi.

1. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo adalah mewujudkan citra instansi dalam mengemban tugas dan juga merealisasikan target penerimaan pajak menjadi nyata. Dalam usaha mencapai tujuan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo berusaha untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Wajib Pajak, meningkatkan penerimaan pajak, sehingga *tax ratio* atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) semakin baik. *Tax Ratio* juga dapat mengindikasikan keberhasilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dalam proses pemungutan pajak. Pada akhirnya sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo adalah tercapainya target penerimaan tahun 2024 sebesar Rp 2.362.209.115.000

2. Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran. Selanjutnya program yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo dalam tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak negara yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan Pembayaran masa yang efektif
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum yang efektif
8. Data dan Informasi yang berkualitas

9. SDM yang kompeten
10. Organisasi yang berkinerja tinggi
11. Pengelolaan keuangan yang optimal

B. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja. sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja 2024. Dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada meliputi SDM. sarana dan prasarana serta dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penetapan kinerja ini telah ditetapkan pula sasaran strategis yang ingin dicapai. indikator kinerja. serta target indikator kinerja .

Sasaran Strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang yang ingin dicapai (bersifat *output/outcome*). atau apa yang ingin dilakukan (bersifat proses). atau yang seharusnya dimiliki (bersifat input).

Indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian sasaran strategis yang memenuhi kriteria SMART-C : *Spesific* (spesifik). *Measureable* (terukur). *Achievable* (dapat dicapai). *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi). *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi).

Untuk mengetahui pencapaian sasaran. telah ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Sesuai penetapan kinerja yang telah disusun maka sasaran strategis yang ingin dicapai. indikator kinerja. serta target dapat dirinci sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target IKU 2024
1		2		3
SS-1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
SS-2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%

Sasaran Strategis (SS)		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target IKU 2024
1		2		3
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
SS-3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
SS-4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
SS-5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
SS-6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
SS-7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
SS-8	Data dan Informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
SS-9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
SS-10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Ketercapaian Kinerja Organisasi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo selama tahun 2024 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot		Indeks Capaian
							Tertimbang		
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%		99,82
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal								99,82
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%		100,10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,42	Max	P/L	19,00%	42,22%		99,42
<i>Customer Perspective</i>							20,00%		101,70
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi								103,17
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,09%	Max	E/L	26,00%	57,78%		100,09
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,40%	Max	P/L	19,00%	42,22%		107,40
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi								100,23
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,23%	Max	E/M	21,00%	100,00%		100,23
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%		115,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif								115,22
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%		120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,43%	Max	E/M	21,00%	50,00%		110,43
5	Persentase pengawasan pembayaran masa								120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,55%	Max	P/M	14,00%	100,00%		120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif								117,62
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%		120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,75%	Max	P/M	14,00%	33,33%		119,75
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,15%	Max	P/M	14,00%	33,33%		113,15
7	Penegakan hukum yang efektif								112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%		120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	98,87%	Max	P/L	19,00%	36,54%		120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%		100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas								113,17
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%		115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%		111,82
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%		115,64
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif								111,27
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,00	Max	P/M	14,00%	33,33%		117,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,97	Max	P/M	14,00%	33,33%		108,20
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,79	Max	P/M	14,00%	33,33%		108,65
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel								120,00
10a-CP	Indeks Kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%		120,00
Nilai Kinerja Organisasi									108,14

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB

Program dan kegiatan tersebut atas sebagian besar mengalami keberhasilan namun ada beberapa kegiatan yang belum mencapai sasaran. berikut penjelasan atas kegiatan-kegiatan tersebut:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

Pencapaian realisasi penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2024 telah mencapai target yang sudah ditentukan yaitu 100.10% atau Rp 2.364.503.053.374 dari Rp 2.362.209.115.000 Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024. Capaian Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah 99.42%.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target penerimaan adalah :

1. Meningkatkan produksi SP2DK;
2. Melaksanakan pengawasan pembayaran pajak terutama terhadap WP strategis;
3. Melaksanakan evaluasi penerimaan persektor untuk menyasar sektor dominan yang tumbuh positif.

2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

- a. Capaian kinerja dari realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 100.09%.. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan dalam rangka mencapai target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produksi SP2DK;
- b. Melaksanakan evaluasi penerimaan persektor untuk menyasar sektor dominan yang tumbuh positif.
- b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Jumlah Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang telah menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan triwulan IV Tahun 2024 capaian kepatuhan adalah sebesar 107.40%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan dalam rangka mencapai target tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi sebagai berikut:

1. Membuat kelas pajak *online* dan tatap muka tentang kewajiban Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
 2. *WhatsApp Blasting* dan telepon Wajib Pajak terkait penyampaian SPT Tahunan;
 3. Berkoordinasi dengan pemberi kerja terkait pelaporan SPT Tahunan karyawannya;
 4. Membagi tugas untuk menghubungi Wajib Pajak. Wajib Pajak karyawan oleh pelaksana. dan Wajib Pajak usahawan dan badan oleh *Account Representative*;
 5. Melakukan pengecekan kepemilikan EFIN dan pelaporan SPT Tahunan kepada setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan di loket TPT
- c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

- a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Capaian kinerja dari realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan Triwulan IV Tahun 2024 mencapai 100.23%. atau sebesar Rp 102.991.085.829 dari target sebesar Rp 102.755.641.000. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan dalam rangka mencapai target realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) sebagai berikut:

1. Memetakan potensi untuk masing-masing sektor dan menentukan fokus sektor prioritas sesuai dengan kondisi kewilayahan masing-masing;
2. Pengawasan penerbitan STP oleh atasan langsung;
3. Melakukan kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

- a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian kinerja dari persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sampai dengan Triwulan IV KPP Pratama Surabaya Wonocolo adalah sebesar 88.80% dari target yang ditetapkan sebesar 74%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan dalam rangka mencapai target perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan sebagai berikut:

1. Mengadakan kelas pajak *online* secara berkala;
2. Mengadakan sosialisasi perpajakan secara langsung atau tatap muka;
3. Melakukan penyuluhan tentang salah satu program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu Insentif Pajak melalui radio *talkshow*.

b. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan KPP Pratama Surabaya Wonocolo pada triwulan IV Tahun 2023 adalah 110.43% dari target 100%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan dalam rangka mencapai target efektivitas penyuluhan dan pelayanan berupa aktif dan efektif dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan pelayanan kepada Wajib Pajak.

5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif

Capaian dari kinerja pengawasan pembayaran masa yang efektif sampai dengan Triwulan IV realisasi pengawasan pembayaran masa adalah sebesar 118.55% dari target 90%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan dalam rangka mencapai target berupa penerbitan STP secara konsisten kepada Wajib Pajak.

6. Pengujian kepatuhan material yang efektif

a. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Capaian kinerja dari penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 120% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai. Pengawasan kepatuhan material dilakukan terhadap :

1. Wajib Pajak Strategis

a. Jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHPt) Wajib Pajak Strategis yang telah diterbitkan sebanyak 238 LHPt dari target sebanyak 140 LHPt atau mencapai 120,00%.

b. Bobot LHP2DK dari DPP 2024 yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 167,6, Bobot LHP2DK dari DPP 2023 yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 268,45, Bobot LHP2DK dari SP2DK *Outstanding* yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 78,6 sehingga akumulasi capaian LHP2DK tindak lanjut adalah 120%.

c. Capaian IKU P4DK Wajib Pajak Strategis sebesar 120.00%.

2. Wajib Pajak Kewilayahan

- a. Bobot LHP2DK dari DPP Wajib Pajak Kewilayahan yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 1057,40 dari target LHP2DK DPP sebesar 763,1 atau mencapai 138,57%. Bobot LHP2DK dari SP2DK *Outstanding* yang selesai ditindaklanjuti sebanyak 30,40 dari target SP2DK *Outstanding* sebesar 21,15 atau mencapai 143,74%, sehingga akumulasi capaian kuantitas adalah 120,00%.
- b. Bobot Kualitas LHP2DK baik dari DPP maupun SP2DK *Outstanding* adalah sebanyak 1078,15 dari target kualitas sebesar 784,00 atau mencapai 137,48%. Sehingga, capaian IKU P4DK Wajib Pajak Kewilayahan sebesar 120,00%.

KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan untuk mencapai target berupa penerbitan SP2DK dan LHP2DK.

b. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Capaian kinerja dari pemanfaatan data selain tahun berjalan sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 119,75% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

c. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar 113,15% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai.

7. Penegakan Hukum yang Efektif

a. Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:

- a) $25\% \times$ Persentase Nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP
- b) $25\% \times$ Persentase Nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan
- c) $25\% \times$ Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan
- d) $20\% \times$ Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu
- e) $5\% \times$ Persentase Ketetapan terbit dibanding dengan Nilai Restitusi

Capaian kinerja dari efektivitas pemeriksaan dan Penilaian sampai dengan Triwulan IV mencapai 120% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan target telah tercapai. Isu utamanya dengan meningkatkan kepercayaan stakeholders dan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat menunjang penerimaan negara melalui efektivitas tindakan pemeriksaan. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan untuk mencapai target dengan menyelesaikan pemeriksaan tepat waktu.

b. Tingkat efektivitas penagihan

Capaian kinerja dari efektivitas penagihan sampai dengan Triwulan IV mencapai 98.87% dari target sebesar 75%. Hal ini menunjukkan target tercapai. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan berupa melakukan tindakan penagihan aktif.

c. Persentase penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Capaian kinerja dari Persentase penyampaian usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sampai dengan Triwulan IV mencapai 100% dari target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan target telah tercapai. Realisasi penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui ketika usul Pemeriksaan Bukti Permulaan disetujui untuk diterbitkan SPPBP. Kepala KPP dapat mengakui realisasi saat sudah dilakukan penelaahan usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Penelaahan Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

8. Data dan Informasi yang berkualitas

a. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jumlah penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah sebesar 115% dari target yaitu sebesar 100%. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan untuk mencapai target adalah terus konsisten dalam kegiatan laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

b. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jumlah penghimpunan data regional dari ILAP adalah sebesar 61.50% dari target yaitu sebesar 55%. Hal ini menunjukkan target tercapai

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Dilakukan pengujian kepada Pegawai untuk mengukur kompetensi agar sesuai dengan standar. Terdapat 3 aspek yaitu Kualitas kompetensi pejabat yang diukur

berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya; Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya dan Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Untuk Kegiatan Kebintalan terkait Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan untuk mencapai target.

b. Indeks Penilaian Integritas Unit

Survei dilakukan atas layanan kepada Wajib Pajak pada 4 (empat) proses bisnis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yaitu: Pelayanan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penagihan. Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan masing-masing probis berdasarkan longlist responden yang telah dikirimkan oleh unit kerja. Indeks Penilaian Integritas Unit mendapatkan score sebesar 91.97 dari target yang ditetapkan sebesar 85 sehingga capaian kinerja sebesar 108.20% Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan untuk mencapai target dengan senantiasa berintegritas dalam bekerja termasuk dalam memberikan pelayanan yang terbaik atas segala proses bisnis yang berhubungan dengan Wajib Pajak.

c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Kegiatan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) telah dilakukan secara rutin setiap triwulan maksimal tanggal 20 setelah triwulan tersebut berakhir, begitu pula dengan kegiatan penerapan manajemen risiko yang rutin dilakukan setiap periode yang telah ditentukan. Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko yang selesai dijalankan sebesar 97.79 dari target yang ditetapkan sebesar 90 sehingga capaian kinerja sebesar 108.65%. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan untuk mencapai target berupa rapat DKO maksimal tanggal 20 dan melakukan pemantauan manajemen risiko setiap triwulan.

11. Penguatan Pengelolaan Keuangan yang optimal

a. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Pengelolaan

anggaran diharapkan dapat mendukung kebutuhan kantor untuk mencapai target penerimaan pajak. Realisasi dari Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 120% dari target yang ditetapkan sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 120%. Hal ini menunjukkan target triwulan IV tercapai. KPP Pratama Surabaya Wonocolo telah melakukan kegiatan berupa pengeluaran anggaran sesuai dengan perencanaan.

Analisis terhadap pencapaian sasaran yang diharapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo menyimpulkan bahwa target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 sudah terpenuhi. dari indikator rencana penerimaan sebesar 2.362.209.115.000 dapat tercapai sebesar Rp 2.364.503.053.374 atau 100.10% dari rencana penerimaan Tahun 2024. Komposisi realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024. 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Rencana	Realisasi	%
PPh Non Migas	1.360.222.379.000	1.412.313.619.664	103.8
PPh Migas	0	165.000	100.0
PPN dan PPnBM	984.598.781.000	933.094.944.019	94.8
PBB dan BPHTB	0	0	0.0
Pajak Lainnya	17.387.955.000	19.093.791.191	109.8
PPh DTP	0	533.500	100.0
Total	2.362.209.155.000	2.364.503.053.374	100.1

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Rencana	Realisasi	%
PPh Non Migas	1.185.926.662.000	1.236.015.057.468	104.22

PPh Migas	0	-300.126	0.00
PPN dan PPnBM	774.420.349.000	849.726.104.228	109.72
PBB dan BPHTB	0	0	0.00
Pajak Lainnya	22.690.864.000	20.381.803.116	89.82
PPh DTP	0	1.723.115.302	0.00
Total	1.983.037.875.000	2.107.845.779.988	106.29

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

Jenis Pajak	Rencana	Realisasi	%
PPh Non Migas	1.218.102.679.000	1.286.148.935.028	105.59%
PPh Migas	-	8.031.177	0.00%
PPN dan PPnBM	323.083.167.000	770.594.959.528	238.51%
PBB dan BPHTB	-	-	0.00%
Pajak Lainnya	25.131.062.000	17.670.490.254	70.31%
PPh DTP	-	3.003.076.507	0.00%
Total	1.566.316.908.000	2.077.425.492.494	132.63%

Realisasi kinerja serta capaian kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Tahun 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	WC	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	99,82
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							99,82
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,10%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,10
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,42	Max	P/L	19,00%	42,22%	99,42
Customer Perspective							20,00%	101,70
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,17
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,09%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,09
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	107,40%	Max	P/L	19,00%	42,22%	107,40
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,23
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,23%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,23
Internal Process Perspective							25,00%	115,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							115,22
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,43%	Max	E/M	21,00%	50,00%	110,43
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,55%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,62
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,75%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,75
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,15%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,15
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	98,87%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							113,17
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	115,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	115,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	Max	P/L	19,00%	57,58%	111,82
Learning & Growth Perspective							25,00%	115,64
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,27
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,97	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,20
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	97,79	Max	P/M	14,00%	33,33%	106,66
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	98,76	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,14

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Tahun 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian	Bobot Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	110,55	33,16
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							110,55	
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	106,29%	Max	E/L	26%	50,00%	106,29	53,15
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	114,80	Max	E/L	26%	50,00%	114,80	57,40
Customer Perspective							20,00%	93,78	18,76
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,46	
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	100,38%	Max	P/L	19%	42,22%	100,38	42,38
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	107,44%	Max	E/L	26%	57,78%	107,44	62,08
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							83,10	
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	83,10%	Max	E/M	21%	100,00%	83,10	83,10
Internal Process Perspective							25,00%	116,19	29,05
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							110,36	
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	120,00%	Max	P/M	14%	40,00%	120,00	48,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	81	84,19	Max	E/M	21%	60,00%	103,94	62,36
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00	
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,64%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							120,00	
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00	60,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00	60,00
7	Penegakan hukum yang efektif							110,60	
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80,00%	83,66%	Max	P/M	14%	26,92%	104,58	28,15
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	91,30%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00	43,85
7c-N	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	80,00%	84,51%	Max	P/L	19%	36,54%	105,64	38,60
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00	
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00	50,91
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	76,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00	69,09
Learning & Growth Perspective							25,00%	110,50	27,62
9	SDM yang kompeten							102,17	
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi*)	92,00%	94,00%	Max	P/M	14%	100,00%	102,17	102,17
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							111,00	
10a-CP	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	94,25	Max	P/M	14%	50,00%	110,88	55,44
10b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	Max	P/M	14%	50,00%	111,11	55,56
11	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal							110,00	
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	110,00	Max	P/M	14%	100,00%	110,00	110,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,59	

*)Disesuaikan dengan klasifikasi Kantor

NILAI KINERJA ORGANISASI
KPP Pratama Surabaya Wonocolo
Tahun 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30.00%	117.63%
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							117.63%
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	132.63%	Max	E/M	21%	60.00%	120.00%
1b-CP	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	100.00%	114.07%	Max	P/M	14%	40.00%	114.07%
Customer Perspective							20.00%	107.35%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							111.76%
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	103.52%	Max	P/M	14%	50.00%	103.52%
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	138.68%	Max	P/M	14%	50.00%	120.00%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							102.94%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	102.94%	Max	P/M	14%	100.00%	102.94%
Internal Process Perspective							25.00%	113.08%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							116.60%
4a-CP	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	67.00%	80.40%	Max	P/M	14%	40.00%	120.00%
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	80	91.47	Max	E/M	21%	60.00%	114.34%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							116.77%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	105.09%	Max	P/M	14%	100.00%	116.77%
6	Pengawasan kepatuhan material yang efektif							107.71%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%	Max	P/M	14%	35.90%	120.00%
6b-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	100.00%	101.47%	Max	P/M	14%	35.90%	101.47%
6c-N	Persentase penyampaian IDLP	100.00%	100.00%	Max	P/H	11%	28.21%	100.00%
7	Penegakan hukum yang efektif							104.32%
7a-CP	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	40.00%	29.19%	Max	P/M	14%	33.33%	72.96%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	102.10%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00%
7c-N	Tingkat efektivitas pemeriksaan	80.00%	100.88%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas							120.00%
8a-CP	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100.00%	143.68%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00%
Learning & Growth Perspective							25.00%	109.20%
9	SDM yang kompeten							120.00%
9a-N	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	80.00%	98.10%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00%
10	Organisasi yang berkinerja tinggi							110.64%
10a-N	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	90.00%	100.00%	Max	P/H	11%	32.35%	111.11%
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	94.25	Max	P/M	14%	41.18%	110.88%
10c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	98.71	Max	A/M	9%	26.47%	109.68%
11	Pengelolaan Keuangan yang optimal							96.96%
11a-CP	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.50%	92.60%	Max	P/M	14%	100.00%	96.96%
Nilai Kinerja Organisasi								112.33%

B. Realisasi Anggaran

Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 s.d. 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	956.079.000	919.518.000	96,18
2	Belanja Barang	3.723.437.000	3.602.827.057	96,76
3	Belanja Modal	84.360.000	84.271.200	99,89
Jumlah		4.763.876.000	4.606.616.257	97,61

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	1.046.164.000	1.024.521.000	97,93%
2	Belanja Barang	3.612.512.000	3.402.533.052	94,19%
3	Belanja Modal	148.229.000	143.535.420	96,83%
Jumlah		4.806.905.000	4.570.589.472	95,08%

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	5.677.155.000	5.346.979.000	94,18
2	Belanja Barang	2.834.510.000	2.779.836.000	98,07
3	Belanja Modal	346.051.000	336.299.000	97,18
Jumlah		8.857.716.000	8.463.114.000	95,54

Realisasi Belanja dengan Estimasi Belanja

TA 2024 dan TA 2023

No	Jenis Belanja	TA 2024		TA 2023	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1.	Belanja Pegawai	956.079.000	919.518.000	1.046.164.000	1.024.521.000
2.	Belanja Barang	3.723.437.000	3.602.827.057	3.612.512.000	3.402.533.052
3.	Belanja Modal	84.360.000	84.271.200	148.229.000	143.535.420
Jumlah		4.763.876.000	4.606.616.257	4.806.905.000	4.570.589.472

(dalam rupiah)

Realisasi Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar 4.606.616.257 atau 96.70% dari anggaran yang ditetapkan dalam DIPA

Bagian Anggaran 999

1.1. Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo

Tidak terdapat pendapatan pada BA 999 satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo pada Tahun Anggaran 2024.

1.2. Belanja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo

Tidak terdapat belanja pada BA 999 satker Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo pada Tahun Anggaran 2024.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah salah satu upaya untuk memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan setiap program kerja yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran dari tujuan suatu instansi pemerintah secara jelas dan transparan.

Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo pada tahun 2024 secara umum telah berhasil mencapai sasaran. Namun, terdapat kegiatan yang signifikan menyebabkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo tidak dapat mencapai sasaran yaitu tercapainya penerimaan pajak negara secara optimal dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo Tahun 2024 diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait dengan laporan ini. Perbaikan sangat diperlukan dan diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penerimaan pajak di tahun mendatang .

Surabaya, 24 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Devi Sonya Adrinca

NIP 19740828 199402 2 001

